

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN Triwulan I Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan. Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan

pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pada Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

- transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2023

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel
Sasaran, Program dan Indikator Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	70,73
		Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Keadualatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	22,22
		Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	25
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80

B. Kebijakan Program dan Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70-80. Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 9) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
 - 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - 11) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (100%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (85%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi; dan
 - 3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (22,22%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan, Outcome : Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (25%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- 1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
 - 2) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 3) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Tabel 2
PENETAPAN RENCANA AKSI
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Indikator Sub Kegiatan	Target /Satuan	Rencana Triwulan I			Rencana Triwulan II			Rencana Triwulan III			Rencana Triwulan IV		
					Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
INDUK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen												
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.787.800	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen												
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.212.200	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen												

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Realisasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sasaran untuk Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (100%);
- 2) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%);
- 3) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
- 4) Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%).

Program ini diimplementasikan melalui :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **300.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **41.595.000,00** atau **13.87%** dan capaian fisik mencapai **19.14%**.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **15.585.600,00** dengan realisasi sebesar Rp. **2.531.208.341,00** atau **16.24%** dan capaian fisik mencapai **5,4%**
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, dimana input anggaran sebesar **Rp. 50.500.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **0,00** atau **0,0%** dan capaian fisik mencapai **0,00%**
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.225.775.140,00** dengan realisasi sebesar Rp.

73.530.600,00 atau **6%** dan capaian fisik mencapai **8,14%**.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.583.001.560,00** dengan realisasi sebesar Rp. **298.238.152,00** atau **18.84%** dan capaian fisik mencapai **21,80%**.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.626.576.200,00** dengan realisasi sebesar Rp. **36.630.000,00** atau **2.45%** dan capaian fisik mencapai **4,17%**.
- 7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **97.903.800,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.382.610,00** atau **1,41%** dan capaian fisik mencapai **4,17%**.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **42.500.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **39.598.500,00** atau **93,17%** dan capaian fisik mencapai **100%**.
- 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **3.000.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **0,00** atau **0,00%** dan capaian fisik mencapai **0,00%**.
- 10) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD) , dimana Input Anggaran sebesar Rp. **46.200.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **0,00** atau **0,00%** dan capaian fisik mencapai **0,00%**
- 11) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.544.484.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **0,00** atau **0,00%** dan capaian fisik mencapai **0,00%**
- 12) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana Input Anggaran sebesar Rp. **36.020.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **0,00** atau **0,00%** dan capaian fisik mencapai **0,00%**

Tabel 3
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan (lampiran-1)

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini	
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00	33,00	33,00	100,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0,00	-	-	0,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00	-	-	0,00	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0,00	-	-	0,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00	-	-	0,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00	-	-	0,00
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0,00	-	-	0,00	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0,00	-	-	0,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,00	100,00	23,00	23,00	100,00

Tabel 3
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan (lampiran-2)

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	100,00	13,00	13,00	100,00
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90,00	100,00	93,00	93,00	100,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,00	100,00	28,00	28,00	100,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	22,50	100,00	25,50	25,50	100,00
				Penyediaan Bahan Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90,00	100,00	93,00	93,00	100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	0,00	43,00	3,00	6,98
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10,00	100,00	13,00	13,00	100,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50,00	-	53,00	3,00	5,66
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Penyediaan Jasa Perlatan dan Perleengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0,00	3,00	3,00	100,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	0,00	18,00	18,00	100,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17,00	100,00	21,00	21,00	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00	3,00	3,00	100,00

Tabel 3
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan (lampiran-3)

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini	
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00	3,00	3,00	100,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00	3,00	3,00	100,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	0,00	3,00	3,00	100,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00	3,00	3,00	

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,

Outcome yang harus dicapai adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (100%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.

Program ini di implementasikan melalui pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi, dengan pagu input

sebesar Rp. **1.320.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 34.600.000,00** atau **2,46%** dan **capaian fisik mencapai 5,00%**. Dengan sub kegiatan antara lain :

- 1) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur ; 10 Unit jumlah lantai jemur yang tersedia
- 2) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya; 10 Unit Mesin pengering Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik ;
- 4) Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Tabel.
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	-	0,00	-	-	0,00
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	-	0,00	-	-	0,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	16,00	100,00	19,00	19,00	100,00
				Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	-	0,00	-	-	0,00

Kendala dan Tindaklanjut :

Tidak ada kendala pada Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, untuk Laporan Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Realisasi Anggaran bulan Maret Terealisasi di bulan April.

III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat , Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (85%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan pagu input sebesar Rp. **2.411.300.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 36.125.000,00** atau **1,5% dan capaian fisik mencapai 14,93%**, Dengan sub kegiatan antara lain :
 - a) Penyediaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan output yaitu : 1) Pelaksanaan Rakor Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); 2) Penyusunan Dokumen NBM Provinsi Banten; dan 3) Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
 - b) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp. **19.7770.279.300,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.330.400,00** atau **0,05% dan capaian fisik mencapai 7,37%**, dengan sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
 - b) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp**2.121.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 365.690.000,00** atau **17,46% dan capaian fisik mencapai 20,87%**, dengan sub kegiatan :
 - a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

Daya Lokal

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

Tabel.
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini	
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	7,00	100,00	10,00	10,00	100,00	
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	-	0,00	-	-	0,00	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	21,00	52,38	45,00	35,00	77,78	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	7,50	100,00	25,50	25,50	100,00	
			Pangan Provinsi	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	0,00	-	-	0,00	
		Pemanfaatan Pangan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12,00	100,00	27,00	15,00	55,56
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	6,00	100,00	15,00	15,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-	0,00	3,00	3,00	100,00	

Kendala dan Tindaklanjut :

Kendala :

1. SK Satgas baru disahkan sehingga rapat koordinasi direncanakan akan dilaksanakan bulan April.
2. Adanya Realisasi yang tidak sesuai target karena adanya 2 rekening yang diremarking, yakni rekening makan minum rapat persiapan dan rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota. Sedangkan untuk rekening Sewa Gedung Gerai Pangan Murah Sedang dalam Proses di Keuangan
3. Tidak terealisasinya semua anggaran dibulan maret karena :
 - 1) Sisa Transport Perjalanan Dinas
 - 2) Efisiensi dari belanja barang untuk di jual/di serahkan ke Masyarakat dan belanja Natura dan Pakan Natura

Tindak lanjut :

1. Investigasi dan Monitoring Stok, Pasokan dan Harga Pangan Sudah di laksanakan
2. Dokumen Bimbingan Teknis Petugas Enumerator Harga Pangan tersedianyan laporan Investigasi dan Monitoring Stok Pasokan dan Harga
3. Tersedianyan dokumen Analisis harga pangan
4. Tersedianyan laporan Pengelolaan CPM dan CBP
5. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangsel dan Kota Tangerang
6. Tersedianyan Laporan Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di daerah Stunting (Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak)

IV. Program Penanganan Rawan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (22,22%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp **200.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.251.000,00** atau **8,13%** dan **capaian fisik mencapai 17,52%**; dengan sub kegiatan :
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp **1.500.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,00 atau 0,00% dan capaian fisik mencapai 0,00%** dengan sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- b) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 4
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	5,00	100,00	8,00	8,00	100,00
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
		Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00

Kendala dan Tindak lanjut

Tidak ada kendala pada Triwulan I ; terlaksananya Kegiatan Rakor dan Evaluasi Keamanan Pangan Segar dan Pengawasan Keamanan Pangan PSAT Kab Serang (Feb) ; Kegiatan gerakan sadar pangan aman di kab. Pandeglang (maret) masih dalam proses keuangan

Tersedianyan Laporan Pelaksanaan Gerakan Sadar Aman di Kab Pandeglang; dokumen sertifikasi PSAT; tersedianya laporan Rapat Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten dan tersedianyan laporan sosialisasi sistem penjaminan Pangan Segar Asal Tumbuhan

- II. Program Pengawasan Keamanan Pangan,** Outcome : Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (25%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, realisasi **Rp.117.049.400,- (13,35) dari pagu sebesar Rp. 877.000.000** : dengan sub kegiatan :
- 1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
 - 2) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 3) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

Tabel 5
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Capaian Kinerja Bulan Ini	Target s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian Kinerja s.d. Bulan Ini
						Kinerja (%)	(%)	Kinerja (%)	Kinerja (%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1,00	100,00	24,00	22,00	91,67
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16,00	100,00	29,00	29,00	100,00
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5,00	100,00	15,00	15,00	100,00
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	0,00	-	-	0,00

B. Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan	
					Tertimbang Kegiatan	Tertimbang Instansi	(Rp.)	(%)
1	2	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)/(6)x100
A	BELANJA OPERASI	48.708.496.000,00	96,66	22,77	11,13	0,62	3.565.348.103,00	7,32
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.518.916.700,00	40,72	24,31	6,25	0,35	2.982.585.303,00	14,54
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	0,60	19,14	15,36	0,85	41.595.600,00	13,87
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.000.000,00	0,13	77,47	64,67	3,60	35.715.600,00	54,11
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	0,02	0,00	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	0,02	0,00	-	-	-	-
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,02	0,00	-	-	-	-
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,02	0,00	-	-	-	-
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.787.800,00	0,22	27,31	16,67	0,93	5.880.000,00	5,21
g	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.212.200,00	0,15	29,17	26,17	1,46	-	-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.530.000.000,00	30,93	13,44	5,40	0,30	2.531.208.341,00	16,24
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.150.600.000,00	30,07	19,56	19,89	1,11	2.505.508.341,00	16,54
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	380.000.000,00	0,75	24,91	12,50	0,70	25.700.000,00	6,76
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SP	16.500.000,00	0,03	12,54	-	-	-	-
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000,00	0,01	0,00	-	-	-	-
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.500.000,00	0,01	0,00	-	-	-	-
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	27.500.000,00	0,05	23,64	-	-	-	-
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.500.000,00	0,10	10,35	-	-	-	-
a	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.500.000,00	0,10	10,35	-	-	-	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.775.140,00	2,43	36,41	8,14	0,45	73.530.600,00	6,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.560.000,00	0,02	24,95	-	-	2.775.000,00	24,03
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.322.000,00	0,20	97,43	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	468.285.200,00	0,93	26,51	3,70	0,21	46.472.700,00	9,92
f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	227.000.000,00	0,45	0,00	-	-	-	-
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.271.840,00	0,67	18,09	11,43	0,64	18.879.000,00	5,61
h	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.624.300,00	0,01	96,08	50,00	2,78	5.403.900,00	96,08
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.001.560,00	3,14	41,09	21,80	1,21	298.238.152,00	18,84
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	0,01	100,00	50,00	2,78	3.289.000,00	99,67
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.506.560,00	3,13	23,27	15,40	0,86	294.949.152,00	18,67
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.626.576.200,00	3,23	20,51	1,39	0,08	36.630.000,00	2,25
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	687.701.429,00	1,36	16,57	4,17	0,23	36.630.000,00	5,33
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.800.000,00	0,30	24,19	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	790.074.771,00	1,57	20,77	-	-	-	-
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	97.963.300,00	0,19	41,90	4,17	0,23	1.382.610,00	1,41
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.697.000,00	0,01	100,00	-	-	-	-
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.530.700,00	0,06	78,81	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.688.500,00	0,05	19,93	-	-	-	-
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	0,03	13,73	-	-	-	-
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000,00	0,01	20,12	-	-	-	-
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.247.600,00	0,04	18,83	25,00	1,39	1.382.610,00	6,51
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	3.300.000,00	0,01	25,09	-	-	-	-
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	46.200.000,00	0,09	10,86	-	-	-	-
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.210.000,00	0,02	0,00	-	-	-	-
II	PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000,00	2,62	19,77	10,80	0,60	446.493.600,00	33,83
10	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Daerah (IIPD)	1.320.000.000,00	2,62	11,83	0,04	0,00	34.348.000,00	2,60
a	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	419.046.000,00	0,83	0,00	-	-	-	-
b	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	400.000.000,00	0,79	0,00	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur	200.954.000,00	0,40	47,31	0,17	0,01	34.348.000,00	17,09
d	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pend	300.000.000,00	0,60	0,00	-	-	-	-
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.292.579.300,00	48,21	10,10	2,78	-	2.968.800,00	0,01
11	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.401.300.000,00	4,77	24,16	14,93	0,83	36.125.000,00	1,50
a	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	600.000.000,00	1,19	25,34	1,00	0,06	-	-
b	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	984.450.000,00	1,95	14,92	15,31	0,85	23.400.000,00	2,38
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga	391.850.000,00	0,78	45,72	37,45	2,08	-	-
d	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	425.000.000,00	0,84	10,65	5,97	0,33	12.725.000,00	2,99
12	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	19.770.279.300,00	39,24	25,80	7,37	0,41	10.330.400,00	0,05
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2.400.000.000,00	4,76	40,78	22,10	1,23	10.330.400,00	0,43
b	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	200.000.000,00	0,40	36,63	-	-	-	-
c	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	17.170.279.300,00	34,08	0,00	-	-	-	-
13	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.121.000.000,00	4,21	17,31	20,87	1,16	365.690.200,00	17,24
a	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	975.200.000,00	1,94	21,67	35,02	1,95	194.767.400,00	19,97
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.045.800.000,00	2,08	23,58	20,38	1,13	164.721.800,00	15,75
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	100.000.000,00	0,20	6,69	7,21	0,40	6.201.000,00	6,20

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan	
					Tertimbang Kegiatan (9)	Tertimbang Instansi (10)	(Rp.) (11)	(%) (12)=(11):(8)*100
1	2	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	BELANJA OPERASI	48.708.496.000,00	96,66	22,77	11,13	0,62	3.565.348.103,00	7,32
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000,00	3,37	17,55	8,76	0,49	16.251.000,00	0,96
	14 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	200.000.000,00	0,40	28,38	17,52	0,97	16.251.000,00	8,13
	a Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,40	28,38	17,52	0,97	16.251.000,00	8,13
	15 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.500.000.000,00	2,98	6,73	-	-	-	-
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	300.000.000,00	0,60	13,29	-	-	-	-
	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.200.000.000,00	2,38	0,17	-	-	-	-
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	877.000.000,00	1,74	29,42	18,69	1,04	117.049.400,00	13,35
	16 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	427.000.000,00	0,85	42,74	20,88	1,16	44.096.200,00	10,33
	a Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	427.000.000,00	0,85	42,74	20,88	1,16	44.096.200,00	10,33
	17 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	450.000.000,00	0,89	16,11	16,50	0,92	72.953.200,00	16,21
	a Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	0,60	22,69	30,14	1,68	63.068.400,00	21,02
	b Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,30	9,53	2,86	0,16	9.884.800,00	6,59
B	Belanja Modal	1.680.504.000,00	3,34	4,85	-	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.580.504.000,00	3,14	9,70	-	-	-	-
	18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.544.484.000,00	3,07	19,40	0,00	-	0,00	-
	a Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.010.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	b Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	147.446.000,00	0,00	16,44	0,00	-	0,00	-
	c Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.516.000,00	0,00	5,64	0,00	-	0,00	-
	c Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.522.000,00	0,00	55,53	0,00	-	0,00	-
	19 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	36.020.000,00	0,07	-	-	-	-	-
	a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.207.000,00	0,03	0,00	-	-	0,00	-
	b Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.813.000,00	0,04	0,00	-	-	0,00	-
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000,00	0,20	-	-	-	-	-
	20 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,20	-	-	-	-	-
	c Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000,00	0,20	0,00	-	-	-	-
J U M L A H		50.389.000.000,00	100,00	13,81	5,56	0,62	3.565.348.103,00	7,08

C. Pelaksanaan Rencana Aksi

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai triwulan I ini diantaranya adalah :

- Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Pra Forum 2024 dan Forum 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja Tahun 2024
- Pada kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi telah melaksanakan FGD Penyaluran DID, Expose data Ke Kab/Kota serta Verval calon penerima bantuan
- Di Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan telah melaksanakan Gelar Pangan Murah di Tangerang Raya dan Bintek Petugas Enumerator Harga.

- Di kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Pemanfaatan Lahan Perkarangan pada Organisasi Masyarakat/PKK di Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Dan juga melaksanakan kegiatan Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Daerah Stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Rakor dan Evaluasi Keamanan Pangan Segar, Gerakan Sadar Pangan Aman dan Pengawasan dan Pemantauan Keamanan PSAT di Peredaran yang dilaksanakan Di Kab. Pandeglang, Serang dan Kota Cilegon.
- UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Melaksanakan Surveilans dan Audit lapangan PSAT di Kabupaten Pandeglang dan Lebak serta di Tangerang Raya. Serta melaksanakan Rapat TIM OKKPD Provinsi Banten.

BAB III

PENUTUP

Laporan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah provinsi Banten pada Triwulan I, baik capaian kerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023 masih belum memenuhi target, dikarenakan banyak capaian target dari indikator sub kegiatan khususnya pada bidang teknis akan tercapai pada akhir tahun, namun untuk reencana aksi sub kegiatan pada bulan ini sudah hampir mencapai target..

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN**
Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640614 199803 2 001